

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM
TAHAP PRA BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI
(Studi di Kawasan Rawan Bencana III Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten)**

**THE ROLE OF THE REGIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY
IN THE PRE-DIASTER STAGE OF MOUNT MERAPI ERUPTION
(Study in Disaster Prone Area III, Kemalang District, Klaten Regency)**

Eriska Nahda Tsabita, S. Agus Santoso

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Sebelas Maret

Email: eriskatsabita@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran BPBD Kabupaten Klaten dalam tahap pra bencana erupsi Gunung Merapi. Kecamatan Kemalang yang berada di Kabupaten Klaten menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam Kawasan Rawan Bencana III yang terdampak baik langsung maupun tidak langsung dari erupsi Gunung Merapi. Maka dari itu, perlu adanya upaya penanggulangan pra bencana untuk meminimalisir dampak kejadian erupsi Gunung Merapi yang didasarkan pada UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 33 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan mengkaji peranan BPBD berdasarkan 5 dimensi yaitu peran pemerintah selaku stabilisator, peran pemerintah selaku inovator, peran pemerintah selaku modernisator, peran pemerintah selaku pelopor, dan peran pemerintah selaku pelaksana sendiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kata Kunci: peran; erupsi; manajemen pra bencana

Abstract

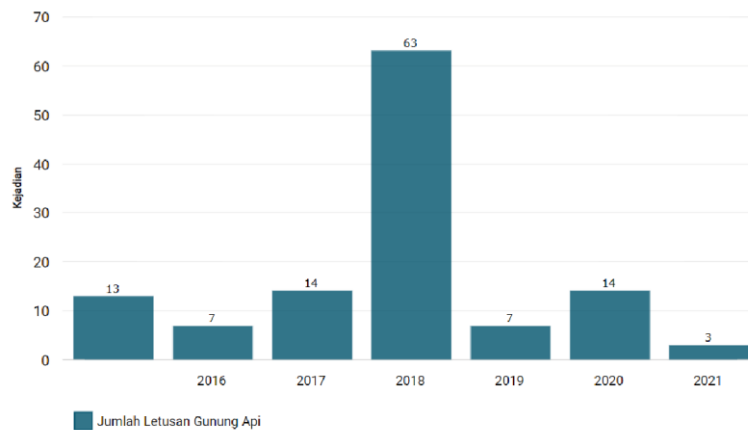
This study was aimed to explain the role of BPBD Klaten Regency in the pre-disaster stage of Mt. Merapi eruption. Kemalang, sub-district in Klaten Regency is one of the areas included in Disaster Prone Area III, which is directly and indirectly affected by the eruption of Mount Merapi. Therefore, there is a need for pre-disaster management efforts to minimize the impact of the eruption of Mount Merapi, which is based on Law No. 24 of 2007 Article 33 on the Implementation of Disaster Management in the Pre-Disaster Stage. This research used qualitative research method with descriptive approach by examining the role of BPBD based on 5 dimensions, namely the role of government as a stabilizer, the role of government as an innovator, the role of government as a modernizer, the role of government as a pioneer, and the role of government as its own implementer. The data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. The data

analysis techniques used by the researchers are data condensation, data presentation, and drawing conclusion.

Keywords: role; eruption; pre-disaster management.

Pendahuluan

Salah satu negara dengan tingkat ancaman bencana yang cukup tinggi adalah Indonesia. Menurut World Risk Report 2021, Indonesia berada di urutan ke-38 dari 181 negara berisiko bencana di dunia. Kondisi tersebut diakibatkan oleh kondisi geografis Indonesia yang terletak di kawasan Cincin Api Pasifik atau disebut juga Ring of Fire yang dimana adalah pertemuan tiga lempeng tektonik yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia dimana terdapat deretan gunung api sepanjang 40.000 km. Hal ini menyebabkan terdapat banyak gunung api yang ada di Indonesia dimana terdapat sebanyak 129 gunung api aktif dan sebanyak 500 gunung api tidak aktif yang berarti 13% gunung api dunia berada di Indonesia (Tinaiy et al., 2020, p.104). Kondisi geografis ini yang terletak di kawasan cincin api menyebabkan Indonesia menjadi negara rawan bencana yaitu erupsi gunung berapi dan gempa bumi. Terjadinya bencana alam tidak dapat diperkirakan dan dihindari baik dari segi waktu maupun kejadian. Selain tidak dapat diprediksi dan dihindari, beberapa bencana alam tidak dapat dicegah oleh manusia, salah satunya adalah erupsi gunung berapi.



Gambar I. 1. Jumlah Letusan Gunung Api di Indonesia 2015-2021

Sumber: BNPB: <https://dibi.bnpb.go.id/kwaktu/index>

Gunung Merapi merupakan gunung berapi teraktif di dunia yang terletak di perbatasan provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasca erupsi besar pada tahun 2010, Gunung Merapi mengalami erupsi efusif pada Mei 2018 hingga status Gunung Merapi ditetapkan menjadi Waspada (level II). Hingga dua

tahun berselang pada Maret 2020, status Gunung Merapi naik menjadi Siaga (level III). Pada kurun waktu 5 tahun terakhir, Gunung Merapi terus mengalami erupsi efusif. Erupsi efusif adalah letusan dalam bentuk lelehan lava melalui retakan atau puncak gunung api dicirikan dengan magma yang didalamnya bersifat basa yang membentuk aliran atau kubah lava.

Kejadian erupsi berkaitan dengan tingkatan status gunung api yang diklasifikasikan menjadi 4 status gunung yaitu normal, siaga, waspada awas (BNPB, 2020). Dari rekap kejadian erupsi sejak tahun 2018, Balai Penyidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menetapkan status Gunung Merapi naik menjadi siaga (level III) pada 5 November 2020 tertulis dalam surat edaran BPPTKG No. 523/45/BGV-KG/2020 dimana Gunung Merapi terus mengalami peningkatan aktivitas vulkanik hingga saat ini. Peningkatan aktivitas Gunung Merapi menimbulkan ancaman bahaya bagi masyarakat di Kawasan Rawan Bencana (KRB). KRB adalah kawasan yang berpotensi terlanda bahaya atau terdampak bencana alam. Pada kejadian erupsi Gunung Merapi, wilayah rentan terdampak masuk kedalam KRB Gunung Api dibagi menjadi KRB I, KRB II, dan KRB III (BNPB, 2017). KRB Gunung Merapi memiliki catatan KRB yang tinggi karena padatnya pemukiman di lereng Merapi. Lereng Gunung Merapi sisi masuk ke dalam provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan untuk bagian yang lain masuk ke provinsi Jawa Tengah dengan pada sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang, untuk sisi utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan timur serta Kabupaten Klaten di sisi tenggara.

Kabupaten Klaten menjadi salah satu daerah yang terkena rawan bencana erupsi Gunung Merapi yang memiliki potensi ancaman kebencanaan tinggi. Dilansir dari laman Magma Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI), desa di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten yang masuk dalam kategori KRB III atau kawasan paling beresiko terdampak bencana Gunung Merapi adalah desa Balerante, desa Tegalmulyo, dan desa Sidorejo. Masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana mendapatkan dampak negatif dari adanya aktivitas Gunung Merapi. Kerugian yang ditimbulkan dari bencana alam dibagi kedalam 3 kategori yaitu kerugian langsung, kerugian tidak langsung, serta kerugian fisik dan non-fisik pada lingkungan maupun sosial (Wardyaningrum, 2016, p.134). Pada tahun 2010, Gunung Merapi mengalami erupsi eksplosif yang membawa dampak serius pada lahan dan masyarakat di wilayah sekitar Gunung Merapi, salah satunya Kota Klaten. Kejadian erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 terhitung menjadi ledakan terbesar dibanding dengan lima erupsi eksplosif sebelumnya.

Dilansir dari laman BNPB, dampak erupsi Gunung Merapi 2010 menyebabkan 347 korban meninggal dan 258 korban luka-luka. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berhenti pada jumlah korban jiwa tetapi juga kerugian materiil lainnya pada sektor permukiman, infrastruktur, listrik, telekomunikasi,

energi, dan air bersih. Terkhusus Wilayah Jawa Tengah, tercatat sebanyak 3.705 rumah terdampak erupsi Gunung Merapi dengan kondisi 551 rumah mengalami kerusakan berat, 950 rumah mengalami kerusakan sedang, dan 2.204 rumah mengalami kerusakan ringan. Kecamatan Kemalang menjadi salah satu wilayah yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi. Kerugian dan dampak yang ditimbulkan karena erupsi Gunung Merapi adalah kerusakan lahan pertanian dan kawasan permukiman dengan luas lahan 501 ha, kawasan pemukiman yang rusak parah seluas 496 ha, dan Desa Balerante Kecamatan Kemalang yang tertutup abu vulkanik sekitar 4-13 cm. Banyaknya kerugian materiil dan jatuhnya korban jiwa karena banyaknya pemukiman di KRB Merapi yang belum sempat dievakuasi dan penanggulangan pra bencana yang belum maksimal. Banyaknya kerugian baik moril maupun materiil ini menunjukkan pada saat itu stakeholders terkait belum siap dalam upaya penanggulangan pra bencana.

Sejak erupsi Merapi 2018, bukaan kubah lava di puncak Gunung Merapi menjadi semakin besar dan terbuka ke arah tenggara. Bukaan kubah lava kearah tenggara ini mengakibatkan potensi guguran dan awan panas. Bukaan kawah pada puncak Gunung Merapi mengarah ke sektor tenggara yaitu Sungai Woro tepatnya ke wilayah Klaten dimana Kecamatan Kemalang berpotensi menjadi jalur luncuran vulkanik sehingga menjadi wilayah prioritas pengawasan dan kewaspadaan. Pada tahun 2020, Gunung Merapi mengalami aktivitas yang mengakibatkan 288 warga di Kecamatan Kemalang melakukan evakuasi sementara dan 1 warga terluka (DIBI, 2022).

Pada tahun 2021, terjadi erupsi efusif yang mengarah ke sisi Barat dan Barat Daya, namun demikian warga di Kecamatan Kemalang khususnya di wilayah KRB III mengungsi untuk mengantisipasi akan adanya erupsi eksplosif yang mengarah ke sisi Tenggara dan Selatan. Sebagaimana dilansir dari Data Bencana Pusdalops BPBD Kabupaten Klaten 2021 terhitung sejak 21-25 Januari 2021 jumlah pengungsi di Desa Balerante tidak mengalami penurunan, jumlah pengungsi di Desa Tegalmulyo mengalami penurunan sebesar 10%, dan Desa Sidorejo tidak melakukan pengungsian. Dilihat dari letak geografis yang berjarak paling dengan puncak gunung Merapi sejauh radius 4 km dan data sebaran erupsi Gunung Merapi, Desa Balerante merupakan desa paling rawan terdampak apabila terjadi erupsi eksplosif.

Terjadinya erupsi gunung api tidak dapat dipisahkan dari dampak bencana yang dapat menyebabkan kondisi kritis bagi pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab dan wewenang yang tercantum dalam UU RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 5 yang berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”. Penanggulangan bencana juga masuk dalam RPJMN 2020-2024 dalam Prioritas Nasional No.6 yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim yang menjadi acuan

penanggulangan bencana dalam UU No. 8 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Klaten dalam misi No.6 yaitu mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dengan demikian, penyelenggaraan penanggulangan bencana menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana bukan hanya dilakukan pasca bencana melainkan juga mengantisipasi gejala-gejala bencana. Lembaga pemerintah yang bertanggungjawab menjalankan tugas penanggulangan bencana baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang berpedoman pada kebijakan yang disahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Oleh sebab itu, Kabupaten Klaten perlu adanya upaya untuk meminimalisir risiko melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berdasarkan teori Siagian (2013), dalam upaya penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Klaten berperan menjadi stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, hingga pelaksana sendiri dalam tahap pra bencana. Menurut UU RI No. 24 Tahun 2007 Pasal 33 menyebutkan bahwa tahapan penanggulangan bencana dibagi menjadi tiga bagian yaitu pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Tahapan pra bencana meliputi kesiagaan, peringatan dini, dan mitigasi (Soehatman Ramli, 2010, p.31). Kesiagaan merupakan unsur penting berupa kegiatan antisipasi melalui pengorganisasian penanganan tepat guna dalam menghadapi datangnya bencana. Langkah lainnya merupakan pemberian peringatan dini yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat terkait ancaman bencana terutama pada masyarakat pada kawasan rawan bencana. Upaya mitigasi bencana merupakan pencegahan untuk meminimalisir dampak yang mungkin timbul dari terjadinya suatu bencana. Tahap mitigasi bencana disusun secara komprehensif dan terencana yang dilakukan melalui upaya pendekatan teknis, pendekatan administratif, pendekatan manusia, dan pendekatan kultural.

Dalam perkembangan zaman yang sudah modern seperti sekarang, permasalahan bencana alam sudah seharusnya diselesaikan melalui pendekatan yang lebih rasional. Mengingat erupsi efusif Gunung Merapi sejak 2018 dan penetapan status gunung merapi pada bulan Maret 2020 yang berada di level III (Siaga), maka langkah yang tepat untuk dilakukan adalah menerapkan penanggulangan pada tahap pra bencana untuk menghadapi ancaman erupsi eksplosif yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Berdasarkan pemaparan diatas terkait kejadian bencana erupsi Gunung Merapi, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang terkait harus melakukan tahapan pra bencana mulai dari kesiagaan, peringatan dini, hingga mitigasi untuk dapat meminimalisir korban jiwa dan kerugian materi akibat bencana erupsi. Dengan demikian, penelitian ini meneliti Peran BPBD Kabupaten Klaten dalam tahap pra bencana erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Klaten.

Metode

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Klaten khususnya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian berjudul Peran BPBD Kabupaten Klaten dalam Penanggulangan Pra Bencana Erupsi Gunung Merapi menjelaskan tahap penanggulangan pra bencana erupsi Gunung Merapi oleh BPBD. Penelitian kualitatif yaitu adalah metode yang digunakan untuk meneliti atau mengkaji objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen utama dengan hasil penelitian yang lebih menekankan makna daripada generalisasi. Menurut Sugiyono (2019), adanya metode penelitian kualitatif dikarenakan terjadinya perubahan cara pandang atau paradigma terhadap suatu fenomena/realita/gejala sosial. Menurut Bogdan dan Taylor (1982) dalam Abdussamad (2021), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil tertulis atau lisan dari objek yang diamati. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif akan mendeskripsikan makna dari fenomena yang diteliti dimana pemaknaan tersebut bergantung kepada kemampuan peneliti dalam menganalisisnya. Peneliti menggambarkan fenomena penanggulangan erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Klaten oleh BPBD Kabupaten Klaten dalam penelitian secara mendetail.

Teknik pengambilan sampel adalah cara yang dilakukan adalah dengan menentukan sampel yang sesuai dengan penelitian dengan melihat sifat-sifat dan penyebaran populasi agar didapatkan data yang valid dan representatif. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan memilih sampel dengan pertimbangan sampel-sampel mana saja yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan peneliti (Patton, 2002 dalam Heryana, 2016). Penentuan sampel penelitian ini dengan memilih sampel yang memahami penanggulangan bencana erupsi Gunung Merapi.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari lapangan atau sumber yang kompeten dengan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, kuesioner, dsb (Sugiyono, 2019). Data primer yang ada pada penelitian ini didapat melalui wawancara dan juga observasi langsung. Observasi dilakukan di tempat penelitian di KRB Kabupaten Klaten yaitu tenggara dan BPBD Kabupaten Klaten. Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada informan. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung namun diperoleh melalui perantara misalnya melalui orang lain atau dokumen yang diperoleh dari berbagai referensi seperti jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang masih relevan untuk digunakan (Sugiono, 2019). Penelitian ini mengambil sumber data sekunder melalui data yang diperoleh dari laman Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Balai Penyidikan dan

Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) untuk memperoleh informasi mengenai erupsi Gunung Merapi.

Pengumpulan data merupakan suatu langkah strategis dalam penelitian karena tujuan dari penelitian yaitu untuk memperoleh data sehingga teknik yang digunakan harus tepat guna. Menurut Sugiyono (2007) dalam Bachri (2010), teknik pengumpulan data dibagi menjadi 4 yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi (gabungan).

Uji validitas data dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi yang menggabungkan berbagai teknik uji validitas guna memperoleh data yang lebih konsisten dan kredibel (Abdussamad, 2021). Dalam penelitian ini, triangulasi bertujuan untuk menguji keabsahan data dari berbagai sumber dengan mengkonfirmasi informasi melalui informan dan dokumen yang sudah ada.

Analisis data adalah proses penyusunan data secara sistematis dengan sumber yang diperoleh dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi dengan cara mengorganisir data ke dalam kategori-kategori khusus dengan membuat sintesa dan kesimpulan sehingga mudah dipahami baik bagi peneliti maupun pembaca. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari tiga langkah yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data:

Hasil dan Pembahasan

Penanggulangan pada tahap pra bencana di Kawasan Rawan Bencana III erupsi Gunung Merapi menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten. Penulis menganalisis peran BPBD Kabupaten Klaten dalam tahap pra bencana erupsi Gunung Merapi dengan menggunakan teori dimensi peran Siagian (2013) yaitu selaku stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri dan teori pra bencana Soehatman Ramli (2010) yang terdiri dari tahap kesiagaan, peringatan dini, dan mitigasi.

1. Peran sebagai Stabilisator

Peran BPBD Kabupaten Klaten dalam tahap pra bencana erupsi Gunung Merapi sebagai stabilisator adalah mewujudkan keseimbangan masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari. Dalam tahap kesiagaan, BPBD mewujudkan ketahanan masyarakat melalui proses sosialisasi, dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai pembagian ancaman di wilayah Kawasan Rawan Bencana (KRB) sebagai bentuk peringatan dini disempurnakan dengan tahapan mitigasi yaitu pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana, Tim Relawan Tangguh, Sekolah Siaga Bencana, dan Desa Tangguh Bencana.

2. Peran sebagai Inovator

Peran BPBD Kabupaten Klaten sebagai inovator adalah sebagai pencetus temuan, sistem, metode, ataupun cara berpikir baru. Dalam hal ini, BPBD

Kabupaten Klaten menjadi sumber dari hal-hal baru yang dicetuskan. Inovasi yang dihadirkan oleh BPBD Kabupaten Klaten bertujuan untuk membangun dan memperbaiki hal yang sudah ada. Maka dari itu, inovasi harus selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan kondisi dan teknologi terutama dalam tahap pra bencana. Inovasi yang dilakukan lebih dulu adalah inovasi di lingkungan pemerintahan dengan tujuan cara dan sistem kerja yang lebih terstruktur agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dalam tahap pra bencana, inovasi birokrasi yang dilakukan adalah dalam hal pembaharuan standar operasional. Inovasi yang selanjutnya adalah Inovasi konseptual mengacu kepada pembaharuan pendekatan yang dilakukan oleh BPBD dalam melakukan mitigasi bencana. Dalam hal ini BPBD menggunakan pendekatan administratif melalui penyusunan Rencana Kontingensi Erupsi sehingga seluruh sumber daya yang tersedia (tak hanya milik BPBD) dapat dipergunakan dengan maksimal terutama ketika terjadi kondisi darurat dan harus dilakukan evakuasi. Penyusunan Rencana Kontingensi Erupsi ini dilakukan oleh BPBD dengan berkoordinasi bersama relawan dan juga dinas-dinas lainnya. Kemudian dilakukan juga inovasi sistem, pada tahapan mitigasi terdapat 2 pendekatan yang dilakukan oleh BPBD. Pendekatan pertama adalah pendekatan teknis meliputi perbaikan jalan yang akan digunakan untuk akses evakuasi. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan administrative dengan cara implementasi Sistem Informasi Evakuasi Ramah Difabel (SIFABEL) yang bertujuan untuk mempermudah evakuasi teman-teman difabel oleh para relawan. Selain di tahapan mitigasi, pada tahapan peringatan dini juga BPBD telah melakukan inovasi dengan pengadaan Early Warning System yang akan membunyikan sirine ketika terjadi pergerakan gunung sebelum terjadinya erupsi. Dalam dokumen Pedoman EWS Masyarakat yang dirilis oleh BNPB pada tahun 2012, disebutkan bahwa sistem peringatan dini ini diberikan/disampaikan berdasarkan analisis lembaga resmi (BPBD, BNPB, BMKG, maupun lembaga lainnya) terhadap pemantauan dan deteksi bencana sehingga dapat diketahui adanya tanda-tanda/indikasi kejadian bencana. Dari indikasi tersebut, peringatan yang dikeluarkan selanjutnya menjadi acuan Masyarakat untuk melakukan Tindakan agar mengurangi resiko yang lebih parah

3. Peran sebagai Modernisator

Peran BPBD Kabupaten Klaten sebagai modernisator adalah wujud aktif negara melalui pemerintah yang selalu menyesuaikan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam tahap pra bencana, modernisasi yang dilakukan ditempuh melalui Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menggunakan teknologi dilakukan dalam tahap pra bencana erupsi Gunung Merapi. Khususnya dalam bidang IT, ada pembaharuan Pos Early Warning System (EWS) di Balerante yang langsung terhubung dengan BPPTKG. Tujuan dari

diadakannya pos EWS ini untuk mengetahui ancaman bahaya lebih dini dan masyarakat bisa mengetahui kapan harus bertindak. Selain diadakannya pos EWS, pemerintah yang berada di KRB III bekerjasama dengan BPBD menghimpun data Difabel dan membentuk Sistem Informasi Evakuasi Ramah Difabel (SIFABEL). Selanjutnya, dalam hal kemampuan dan Kemahiran manajerial, BPBD terutama menunjukkan hal ini dari kewajiban dan posisi BPBD sebagai fasilitator baik dalam agenda pra kebencanaan (baik di Tingkat kesiagaan, peringatan dini, maupun mitigasi). Hal ini terlihat dari terlaksananya berbagai agenda kesiagaan, peringatan dini, juga mitigasi pra bencana, seperti sosialisasi dan simulasi evakuasi rutin yang dilaksanakan bersama Masyarakat. Selain itu terdapat koordinasi rutin dengan OPD-OPD dan kelompok-kelompok relawan yang juga dilakukan secara berkala sehingga terdapat keterpaduan visi dan langkah-langkah yang diambil ketika menghadapi situasi bencana. Sedangkan dengan visi yang jelas, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terdapat keselarasan tujuan dari penanggulangan pra bencana gunung Merapi di KRB Kemalang yang disampaikan oleh pihak BPBD Kabupaten Klaten, pemerintah Desa Balerante, dan warga Desa Balerante. Tujuan itu terutama adalah untuk penyelamatan masyarakat, ternak, juga aset-aset penting yang dapat dibawa (seperti surat-surat berharga), serta menyelamatkan (mempersiapkan) perekonomian Masyarakat agar tetap stabil ketika terjadi bencana. Berkaitan dengan pendalaman Masyarakat, para narasumber memiliki pandangan yang sama bahwa pelaksanaan program penanggulangan pra bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten ini telah mampu diterima dengan baik dan juga mengubah persepsi Masyarakat.

4. Peran sebagai Pelopor

Dalam penanggulangan bencana, BPBD berperan sebagai pelopor dalam seluruh tahap pra bencana yaitu, BPBD menjadi contoh langsung untuk masyarakat dalam pelaksanaan program pra bencana sehingga mengubah persepsi masyarakat untuk mau turut serta dalam upaya pra bencana erupsi Gunung Merapi. Melalui program dan inovasi yang dijalankan, BPBD mampu menarik masyarakat dan membentuk lembaga setempat untuk meminimalisir dampak bencana. Selanjutnya kepeloporan dalam Ketaatan kepada peraturan memiliki tugas dan wewenang BPBD dalam penanganan bencana salah satunya adalah dalam penerapan perundangan yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tahap pra bencana tersistematis. Maka dari itu, peraturan yang telah ditetapkan selalu disosialisasikan ke pihak yang berada dalam KRB III dimana peran BPBD adalah sebagai fasilitator.

5. Peran sebagai Pelaksana Sendiri

Peran BPBD Kabupaten Klaten sebagai pelaksana dapat dianalisa dari pelayanan yang diberikan oleh BPBD selaku lembaga publik kepada

Masyarakat. Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis, terlihat bahwa para pihak mengakui urgensi peran dari BPBD sendiri dalam memberikan pelayanan penanggulangan pra, saat, dan juga pasca bencana. Menurut Pak Sukono, urgensi ini terutama berkaitan dengan bantuan logistic dan personel yang diberikan oleh BPBD dalam menangani bencana, sangat membantu pemerintah desa yang memiliki alokasi dana kebencanaan terbatas.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klaten dalam tahap pra bencana erupsi Gunung Merapi sesuai dengan teori Ramli (200) dimulai dari tahap kesiagaan, peringatan dini, hingga mitigasi sudah berjalan dengan terstruktur. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Tahap Pra Bencana Erupsi Gunung Merapi (Studi di Kawasan Rawan Bencana III Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten) melihat dari teori Ramli (2010) proses kesiagaan, peringatan dini, dan mitigasi telah tercapai. Tahap pra bencana erupsi Gunung Merapi menurut Siagian (2013) sudah terlaksana meskipun belum optimal. Peran BPBD Kabupaten Klaten sebagai inovator masih perlu dilakukan perbaikan mengingat kebutuhan masyarakat dalam menghadapi ancaman erupsi Gunung Merapi. Dalam melakukan perannya sebagai inovator, peran BPBD Kabupaten Klaten perlu ditingkatkan dalam beberapa hal seperti inovasi sistem yaitu peningkatan Sistem Evakuasi Ramah Difabel (SIVABEL) dengan melakukan koordinasi antara BPBD Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Desa di Kawasan KRB III Kecamatan Kemalang. inovasi sistem evakuasi dari pihak BPBD Kabupaten lansia karena lansia juga membutuhkan perlakuan khusus. Jika sistem evakuasi bagi lansia ini dibuat lebih terstruktur, diharapkan pencegahan korban jiwa lansia juga dapat dimaksimalkan. inovasi produk dalam hal ini adalah perbaikan jalur evakuasi agar saat terjadi bencana, hambatan yang mungkin terjadi dikarenakan jalur evakuasi dapat diminimalisir. Sehingga diharapkan proses evakuasi dapat berlangsung secara cepat.

Referensi

- Abdussamad H., Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Ahyanti, M., Ahyanti, A., Hastuti, R. P., Sulastri, S., Larsofely, R. L., & Murwanto, B. (2022). Pemanfaatan Mata Air Gunung Dalam Mewujudkan Penyediaan Air Bersih Pascabencana Tsunami. *Indonesia Berdaya*, 3(2), 277-286.
- Astuti V. W., & Rimawati. (2020). *Disaster Management in Kelud Community*. *STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 9 (2), 1078-1084.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *Jurnal teknologi pendidikan*, 10(1), 46-62.

- BNPB. (2020). *Klasifikasi Tingkatan Gunung Berapi*. Bogor: <https://bnpb.go.id/>
- BNPB. (2021). *Jumlah Letusan Gunung Api di Indonesia Sepanjang 2010-2020*. Indonesia: <https://dibi.bnpb.go.id/kwaktu/index>
- BPPTKG Yogyakarta. (2019). *Peta Wilayah Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi*. Yogyakarta: <https://bpptkg.esdm.go.id/>
- DIBI. (2022). *Korban dan Kerusakan Bencana Letusan Gunung Api Kabupaten Klaten 2020*. Indonesia: <https://dibi.bnpb.go.id/kbencana/index>
- ESDM RI. (2014). *Gunung Merapi Jawa Tengah*. Semarang: <https://vsi.esdm.go.id/>
- Fariza, A., & Handayani, B. L. (2022). Tindakan Struktural Mitigasi Bencana Pemerintah Di Indonesia. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(2), 288-305.
- Gerungan, W., A. (1998). *Psikologi Sosial*. Bandung: PT Eresso.
- Hafida, S. H. N. (2019). Perubahan Kesiapan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Erupsi Gunung Berapi. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 396-407.
- Heryana, A. (2016). Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif. *Kesehatan Masyarakat*, 26-33. Retrieved from Prodi Kesehatan Masyarakat.
- Kamadhis UGM. (2007). *Sistem Penanggulangan Bencana Alam*. Yogyakarta: Buletin Kamadhis UGM.
- Khoirunnisa, S. A., Warsono, H., & Suryaningsih, M. (2014). Kinerja Pemerintah dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kawasan Rawan Bencana (KRB) di Kabupaten Magelang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 3(3), 141-149.
- Mahardika, D., & Setianingsih, E. L. (2018). Manajemen Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Banjir di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 502-518.
- NURMI, J. E. (1989). Planning, motivation, and evaluation in orientation to the future: A latent structure analysis. *Scandinavian journal of psychology*, 30(1), 64-71.
- Pratiwi, T. S., & Syafira F. B. S. (2023). *The Role Of International Non-Governmental Organizations (NGOs) In Disaster Management Of Mt. Sinabung Eruption In Karo District, North Sumatra, Indonesia*. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 1 (2), 27-36.
- Ramli, Soehatman. (2010). *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Manajemen)*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Rijali, Ahmad. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81-95.
- Saldana, Miles, & Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications.

- Saputra, D. P., Alfaritdzi, R. M., & Kriswibowo, A. (2020). Model Manajemen Bencana Gunung Meletus Di Gunung Kelud. *Public Administration Journal of Research*, 2(2), 109-126.
- Siagian, P. (2003). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Sorjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Susilo, A. N., dan Iwan R. (2014). Analisis Tingkat Resiko Erupsi Gunung Merapi Terhadap Pemukiman di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. *Jurnal Teknik PWK*, 3(1), 34-49.
- Tinaiy, A. M., Octavianus H. A. R., & Frits O. P. S. (2020). Pemetaan Kerentanan terhadap Bahaya Bencana Vulkanik Gunung Soputan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Spasial*, 7(2), 104-123.
- Wardyaningrum. (2016). Perubahan Komunikasi Masyarakat dalam Inovasi Mitigasi Bencana (Studi pada Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana Gunung Merapi Sebelum dan Setelah Erupsi Tahun 2010). *Jurnal Komunikasi*, 10(2), 133-152.
- Wilade, J. I., Pangemanan, S., & Sumampouw, I. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Gunung Api Karangentang Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1-9.
- Wurin, K. M., & Wardhono, H. Evaluasi Implementasi Penanganan bencana Banjir Di Desa Lamanela Kecamatan Ileboleng Nusa Tenggara Timur. *SARR*, 1(3), 535-566.